

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode *Error Correction Model (ECM)* mengenai pengaruh penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah terhadap realisasi belanja negara di Indonesia periode 2005-2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja negara di Indonesia.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan pajak yang berhasil dihimpun pemerintah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan melalui belanja negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar sehingga memiliki peranan yang dominan dalam menjaga kapasitas fiskal pemerintah dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja negara di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PNBP mampu menjadi sumber penerimaan alternatif yang memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan penerimaan pajak, PNBP tetap memberikan dukungan yang penting terhadap pembiayaan belanja negara, terutama ketika penerimaan perpajakan mengalami perlambatan.

Penerimaan hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja negara di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya hibah yang diterima pemerintah belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan realisasi belanja negara. Hal ini disebabkan karena nilai hibah relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan negara serta penggunaannya

umumnya telah ditentukan untuk program tertentu sehingga tidak secara langsung memengaruhi keseluruhan belanja negara.

Penerimaan pajak, PNBP, dan hibah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja negara di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga sumber penerimaan negara tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pembiayaan belanja negara. Dengan demikian, optimalisasi seluruh sumber penerimaan negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan terus meningkatkan penerimaan perpajakan melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta perluasan basis pajak agar kemampuan pembiayaan belanja negara semakin kuat.

Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber PNBP dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, memperbaiki tata kelola aset negara, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara dapat terus meningkat.

Pemerintah juga diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah melalui sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih baik agar hibah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang memengaruhi realisasi belanja negara, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, utang pemerintah, defisit APBN, nilai tukar, maupun investasi pemerintah sehingga model penelitian menjadi lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang maupun metode analisis lain seperti *ARDL*, *VAR/VECM*, atau *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai hubungan jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori keuangan negara yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun penerimaan negara. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung teori fungsi pajak (*budgetair*) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Pada sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PNBPN juga penting dalam memperkuat kapasitas fiskal negara sebagaimana dijelaskan dalam teori Revenue Dominial. Sementara itu, pengaruh hibah yang relatif kecil menunjukkan bahwa efektivitas hibah lebih dipengaruhi oleh mekanisme implementasi dan pengelolaan dibandingkan besarnya nilai hibah yang diterima.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak,

peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penyempurnaan administrasi perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan potensi PNBPN melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi aset negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menghasilkan PNBPN.

Di sisi lain, meskipun hibah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja negara, pemerintah tetap perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan hibah secara tepat sasaran agar manfaatnya terhadap pembangunan dapat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2020). Laporan tahunan Asian development bank 2020. **Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan**, 1–88.
- Adhitama, S., & Joshua, S. (2023). Analisis Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara Stan. **EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)**, 7(2), 233–253. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5368>
- Ahmadi, J. S., & Sampurna, F. A. (2024). Implementation of Grant Proposal Policy Through Electronic Grant System in DKI Jakarta Province. **Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik**, 14(2), 499. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.66403>
- Asri, N., & Pande, H. (2021). *Yanto* 3. 2(2).
- Bellasuti Solventiani, & Ima Amaliah. (2022). Pengaruh antara Penerbitan Sukuk Negara terhadap Defisit APBN Indonesia Tahun 2008-2019. **Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis**, 1(2), 118–125. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.511>
- Buhaerah, P. (2017). Financial Development and Economic Growth: A Case Study of Indonesia. **Kajian Ekonomi & Keuangan**, 1(2), 166–180. <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Ernawati, W., Aziz, A., & Mualimin, J. (2022). Analysis of Factors Affecting State Revenue Receipts From the Taxation Sector. **Journal of Finance and Business Digital**, 1(3), 157–170. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1316>
- Erni Yulianti, Muhammad Surya, Dian Sulistyorini Wulandari, Selfiani, & Muhammad Ahmi Husein. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Dki Jakarta. **Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora (Eksishum)**, 1(1). <https://doi.org/10.63494/eksishum.v1i1.60>
- Faizin, M. (2020). Penerapan Vector Error Correction Model pada Variabel Makro Ekonomi di Indonesia. **Jurnal Ekonomi**, 25(2), 287. <https://doi.org/10.24912/je.v25i2.671>
- Hasibuan edi, S. L. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. **Jurnal Wawasan Yuridika**, 1(1), 86–105.
- Islam, F., & Mawhinney, O. (2023). *Build Forward Better 2023*. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/build-forward-better-2023/#:~:text=The Risks to Education Index 2023 shows that education systems,strain on countries' education systems.>
- Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Keuangan, **Kementerian Keuangan BA 015 TA 2022. Trends in the Sciences**, 27(11), 11_95-11_103.

- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2018). Manajemen keuangan publik. *Jurnal Kementrian Keuangan*, 1, 125–130.
- Kurnia, E., Tri Setyo Mulyani, H., & Ruben Manullang, R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Elektronik*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.61533/jinbe.v2i1.261>
- Marwanto, M. (2014). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Piranti Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Unisia*, 16(31), 59–70. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol16.iss31.art7>
- Mauleny, A. T. (2022). Penguatan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi Uu Pengelolaan Pnbp. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 2(1), 11–31. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i1.31>
- Melissa Ariffin¹, dan T. H. S. (2007). *Sistem Perpajakan Di Indonesia*. 28, 523–534.
- Nasution, R. M. T., & Hasibuan, R. R. A. (2024). Pemanfaatan Penerimaan Bukan Pajak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Negara. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 4(2), 65–76. <https://doi.org/10.30656/jika.v4i2.9379>
- Nersiwad. (2021). Kinerja Keuangan Pemerintah (Tax Ratio, Tax Base, dan Penerimaan Non Pajak) Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 63–71. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Periode, U., & Berakhir, Y. (2022). *Kemenkeu 2022. Ba 015*.
- Purnomo, A. (2025). *Analisis Ekonometrika Metode Error Correction Model (ECM) Peran Konsumsi Rumah Tangga , Pengeluaran Pemerintah , Investasi , dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 3(1), 24–37.
- Pusat, M. C., Anggaran, K., Keahlian, B., Perwakilan, D., & Ri, R. (2020). Optimalisasi Penerimaan Laba BUMN Sektor Perbankan sebagai upaya meningkatkan PNBPN Optimization of Income in the Banking Sector SOE Income as an Effort to Increase PNBPN. *Jurnal Budget*, 5(2), 67–83.
- Putra, A. (2023). *Penerimaan Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam*. 11(1), 29–37. <https://jurnal.umjambi.ac.id/JD/article/view/272/175>
- Rahmawati, A. (2025). *Efektivitas dan Kontribusi penerimaan negara bukan pajak di UIN Salatiga Anida Rahmawati ani_rahma21@yahoo.com penulis*. 10, 236–257.
- Ranto, S. R. (2019). Terhadap Ihsg Di Bursa Efek Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model (Ecm). *Jurnal Derivat*, 6(1), 12–24.
- Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2025*. (2025). Badan Pusat Statistik.

- Rizki, I., & Hodijah, S. (2023). *Pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi periode Tahun 2001-2019*. 18(3), 1–14.
- Rohmah, S. N., & Okfitasari, A. (2023). Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia. *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 142–148. www.bps.go.id
- Rosyadi, M. R. (2024). Determinan Penerimaan Pajak Daerah Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(2), 222–231. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.696>
- Safuan, S., & Mardiana, T. (2023). Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi dalam Rangka Meningkatkan Good Governance. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 6(3), 365–376. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v6i3.30673>
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif*, 26(2), 110–119. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>
- Sappe, S., & Saidah, D. (2017). Implementation of State Civil Apparatus Policy in Indonesia Selpiah Sappe dan Dede Saidah I Imementation of state civil apparatus policy in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, IX, 42–66.
- Statistik, B. P. (2025). *Tabel Anggaran Belanja Pemerintah (Milyar Rupiah), 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MiMy/tabel-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi.html>
- Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Cenderawasih, U. (2022). *Evaluasi terhadap penatausahaan belanja hibah pada Pemda Sarmi (Studi Kasus BPKAD Sarmi) Rachel Lies Kambu*. 5, 48–59.
- Sugiyono. (2018). *KUANTITATIF*.
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, I. (2022). *Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan negara bukan pajak di Indonesia* 4(6).
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>
- Ujang Enas, Moeljono, Arif Zunaidi, Yanuar Pribadi, M. I. S., Beta Andri Anggiano Uliansyah, Edi Sunyoto, Rosdiana Sijabat, V. S., Hartoto, Dani Sugiri, Hantanti Agustin Rahayu, D. C. P., & Agung Arie Pratama, S. (2023). *Keuangan Negara*.
- Utami, N., Islam, U., Sumatera, N., Saragih, R. F., Islam, U., Sumatera, N., Daulay, M., Islam, U., Sumatera, N., Maulana, M. D., Islam, U., Sumatera, N.,

- Ramadani, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan. ***Journal of Management and Social Sciences(JIMAS)***, **2(1)**, 46–59.
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). ***Owner: Riset & Jurnal Akuntansi***, **6(April)**, 1304–1317.
- Yati Mulyati¹, Diana Sari, D. P. (2024). ***Kebijakan Tax amnesty dan program pengungkapan sukarela (PPS) serta implikasinya terhadap penerimaan pajak dan Tax ratio di Indonesia***³, 167–186.